

Gus Yahya Ngadep Presiden Jokowi, Laporkan Hasil Muktamar ke-34 NU

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih, K.H. Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya di Istana Kepresidenan Bogor.

Gus Yahya datang untuk melaporkan hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang berlangsung pada 22-24 Desember 2021 lalu di Lampung.

"Saya melaporkan hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama kemarin, bahwa saya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Sedangkan K.H. Miftachul Achyar ditetapkan sebagai Rais Aam," katanya usai pertemuan, Rabu (29/12).

Selain itu dia juga melaporkan hal-hal yang disepakati di dalam muktamar.

"Kemudian saya melaporkan juga hasil-hasil yang disepakati di dalam muktamar mengenai program-program, agenda-agenda yang tentunya nanti akan sangat terkait dengan prospek kerja

sama-sama, termasuk dengan pemerintah," ujarnya.

Dia mengungkapkan, bahwa Pemerintah dan Nahdlatul Ulama mempunyai tanggung jawab yang sama untuk merawat, menjaga, dan membangun bangsa Indonesia. "Antara Nahdlatul Ulama dan pemerintah ini harus terus-menerus dalam kerja sama yang erat untuk melaksanakan tanggung jawab itu," tuturnya.

Sebagai Ketua Umum PBNU yang baru, Gus Yahya berharap untuk menyempurnakan konsolidasi organisasi sehingga Nahdlatul Ulama nantinya bisa menjadi agen transformasi. "Ketika kita memiliki agenda-agenda nasional untuk menggerakkan masyarakat secara luas, maka Nahdlatul Ulama ini harus bisa sungguh-sungguh efektif dalam menjalankan peran untuk partisipasi masyarakat tersebut, termasuk di dalam ikut membantu kesuksesan apa yang telah diabdikan oleh pemerintah," tandasnya. ● me

2 Polhukam

FOTO/ANT



TAKLIMAT BIDANG PMK

Menteri Koordinator Pembanguan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi (tengah) bersama Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati (kiri), Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kanan) memberikan paparan pada acara Taklimat (Pengarahan) Bidang PMK Mewujudkan #SDMUnggul Indonesia Maju di kantor Kementerian PMK, Jakarta, Rabu (29/12). Dalam paparannya Menko PMK menyampaikan beberapa hal diantaranya program penanganan COVID-19 serta target PMK 2024.

RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas, Pemerintah Konsentrasi Perbaiki UU Ciptakerja

Kemenkumham akan melakukan perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

JAKARTA (IM) - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah kini fokus memperbaiki Undang-undang (UU) Cipta Kerja sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu, ia sampaikan terkait belum masuknya Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Ia mengatakan, RUU Perampasan Aset akan dikonsentrasikan setelah perbaikan undang-undang Omnibus Law tersebut.

"Rencana Undang-undang perampasan aset kan dari pemerintah sudah, tapi karena kita ini target prolegnas, kita kan konsentrasi dulu perbaikan omnibus law," ujar Yasonna di Gedung Pengayom Kemenkumham, Rabu (29/12).

Terkait perbaikan UU Cipta Kerja tersebut, menurut Yasonna, pihaknya akan bekerja secara simultan. Kemenkumham, imbuhnya, akan melakukan perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (PPP).

"Ini kan awal tahun nanti dijalankan, prolegnasnya sudah, nanti akan kita eksekusi. Dalam beberapa bulan kan selesai kita berkoordinasi dengan DPR tentang itu," ucap Yasonna.

"Kita harapkan nanti masa sidang depan sudah ada kemajuan," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menjelaskan duduk persoalan mengapa Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana tak kunjung terselesaikan, bahkan tak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

Menurut Baidowi, RUU itu tak masuk karena pada saat rapat penyusunan di Baleg, pemerintah pun tidak menyertakannya sebagai RUU usulan untuk Prolegnas Prioritas.

"Ya kalau enggak diusulkan di 2022, kemarin ketika rapat Prolegnas, itu kan enggak diusulkan. Waktu membahas Prolegnas Prioritas 2022 kan itu terbuka disampaikan, rapatnya terbuka, ada enggaknya RUU itu diajukan?," kata Baidowi kepada wartawan, Rabu (15/12) lalu.

Sebelumnya, Baleg telah

menetapkan 40 RUU masuk daftar Prolegnas Prioritas 2022. Hal tersebut diputuskan dalam rapat kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/12) lalu.

Dalam 40 RUU itu, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tidak masuk dalam daftarnya, baik melalui usulan DPR, usulan Pemerintah, usulan DPD, maupun daftar RUU Kumulatif Terbuka.

Menyikapi hal tersebut, Baidowi mengklaim pihaknya lantas tak bisa menjadi satu-satunya yang disalahkan akan tersendatnya RUU Perampasan Aset. Pasalnya, ia menekankan bahwa dalam praktiknya, penyusunan Undang-undang membutuhkan keterlibatan antara DPR dan pemerintah.

Sehingga, jika pemerintah sendiri tidak mengusulkan RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas, maka Baleg pun tidak dapat menyetujui.

"Ya kalau enggak diajukan, kenapa kita mau menyetujui. Jadi jangan semuanya DPR menjadi sasaran. RUU itu diajukan enggak kemarin, ketika penyusunan prolegnas? Kok tiba-tiba kita yang jadi sasaran gitu lho?," jelas Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR itu.

Oleh karena itu, Baidowi meminta seluruh pihak untuk mengetahui duduk persoalan seperti apa, sehingga RUU

Perampasan Aset kembali tak masuk Prioritas 2022.

Menurut dia, hal ini perlu diketahui agar DPR tidak terus-terusan menjadi sasaran tembak jika suatu UU yang mendesak untuk dihadirkan,

justu tak kunjung terwujud.

"Jadi begitu ya, jadi dilihat dulu akar masalahnya. RUU Perampasan Aset itu diusulkan tidak? Kalau ndak, ya ndak mungkin kita utak atik, begitu kan," ujarnya. ● han



FOTO: ANT

PENGANUGERAHAN KEPUTUTAN TINGGI STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih (kiri) menyerahkan piala dan piagam peringkat pertama Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 kategori kementerian kepada Irjen Kemenlu Ibnu W Wahyutomo di Jakarta, Rabu (29/12). Ombudsman Republik Indonesia mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 pada 24 kementerian, 15 lembaga, 34 provinsi, 98 kota dan 416 kabupaten.

Kembangkan Kasus Suap Bupati Kolaka Timur, KPK Usut Pengajuan Pinjaman Dana PEN Daerah

JAKARTA (IM) - Penyidik KPK saat sedang mengusut kasus baru terkait dugaan suap pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) tahun 2021. Hal ini merupakan pengembangan kasus suap yang menjerat Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur.

"KPK saat ini melakukan pengembangan penyidikan dari kegiatan tangkap tangan terkait perkara dugaan korupsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Tahun 2021," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (29/12).

"Dalam pengembangan perkara ini, diduga ada tindak pidana korupsi lain yaitu adanya pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah)

Tahun 2021," tuturnya.

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam proses penyidikan perkara ini. Hanya saja Ali masih enggan membeberkan nama-nama tersangka.

"Mengenal uraian lengkap perkara, siapa saja pihak-pihak siapa yang nantinya akan diumumkan sebagai tersangka disertai pasal sangkan yang disangkakan belum dapat kami informasikan saat ini," kata Ali.

Sesuai kebijakan baru pimpinan KPK jilid V, lembaga antirasuah akan mengumumkan penetapan tersangka setelah dilakukan proses penangkapan dan penahanan. Ali pun berjanji pihaknya akan transparan dalam mengusut perkara ini.

"Pada saat upaya paksa penangkapan dan penahanan, KPK akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," ucapnya. ● han

Jaksa Minta Majelis Hakim Menolak Eksepsi Jerinx SID

JAKARTA (IM) - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur melanjutkan sidang perkara pengancaman melalui media elektronik dengan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx SID, Rabu (29/12).

Sidang dilanjutkan dengan beragendakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi Jerinx SID. Dalam kesempatan itu, jaksa meminta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa lantaran sudah memasuki pokok perkara.

"Kami penuntut umum menyatakan keberatan atas eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima," ujar JPU. Jaksa menambahkan bahwa dalam surat dakwaan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHP dan meminta majelis hakim untuk melanjutkan perkara tersebut. "Melanjutkan persidangan untuk melakukan pemeriksaan materi pokok perkara," tuturnya.

Salah satu poin dalam eksepsi Jerinx mengatakan

dakwa tidak logis antara fakta perbuatan dengan bukti visum et repertum psychiatricum. Namun JPU menilai, keberatan itu sudah memasuki ranah pembuktian materi pokok perkara.

"Artinya, ada penilaian terhadap alat-alat bukti yang semestinya dilakukan nanti pada tahap pembuktian di persidangan. Dengan demikian, maka alasan keberatan penasihat hukum terdakwa harus ditolak," ujarnya.

Sidang Jerinx akan dilanjutkan majelis hakim pada 5 Januari mendatang dengan agenda putusan sela. Dengan band Superman Is Dead itu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya, sejak 1 Desember 2021.

Adam Deni melaporkannya atas dugaan pengancaman melalui media elektronik. Pelaporan itu bermula ketika keduanya cekcok soal teori sang musisi yang mengklaim kalangan selebriti mengendori COVID-19.

Puncaknya, Jerinx mengamuk karena akun Instagram pribadinya raib. Dia diduga melakukan ancaman kepada Adam Deni melalui sambungan telepon. ● han

Menhan Prabowo Bertemu KSAU Bahas Soal Alutsista hingga Operasional Program

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsdal TNI Fajar Prasetyo di Ruang Manggala Yudha, Kemahan, Jakarta Pusat, Selasa (28/12).

Pertemuan tersebut membahas alutsista TNI AU dan program kerja ke depan. Dalam pertemuan itu, Prabowo turut didampingi Wamenhan Letjen TNI M Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Dirjen Renhan Kemhan Mayjen TNI Budi Prijono, dan beberapa pejabat utama lainnya.

"Pertemuan tersebut membicarakan mengenai penambahan kekuatan dan kesiapan sistem pertahanan udara dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia," demikian pernyataan Kemahan melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (29/12).

Sementara itu, Fajar didampingi Asrena KSAU Marsda TNI Purwoko Aji, Asops KSAU Marsda TNI Khairil Kusbi, Aslog KSAU Marsda TNI Fajar Sumariaji, dan Asmkel KSAU Marsda TNI Amrizal.

Sebagaimana diketahui, TNI AU akan mendapat tambahan pesawat tempur baru F-15EX buatan Boeing, Amerika Serikat dan Rafale, buatan Prancis. Kehadiran pesawat tempur tersebut akan menambah kekuatan TNI AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia dari ancaman musuh.

"Kalau pesawat mungkin 2 sampai 3 skuadron. Insy Allah (lebih dari 30 pesawat)," ujar KSAU Marsdal TNI Fajar Prasetyo saat kegiatan Press Tour & Media Gathering KSAU 2021 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (22/12).

Fadjar menjelaskan, untuk

memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia, saat ini TNI AU membutuhkan pesawat tempur generasi 4,5 plus, heavy atau medium ke atas.

Berdasarkan kebutuhan itu, pilihan sudah mengerucut kepada dua jenis pesawat yakni, F-15EX dan Rafale.

"Kita saat ini sudah ada F-16, sudah ada Sukhoi. Tapi pengadaan pesawat ini rentang waktu tidak sebentar. Sangat-sangat panjang prosesnya," ucapnya.

Menurut Fadjar, Menhan Prabowo Subianto telah memberikan penjelasan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai anggaran pengadaan pesawat tempur yang akan digunakan hingga 30-40 tahun ke depan.

"Di dalam renstra memang tidak ada. Ini memang buah pikiran dan Pak Menhan dengan masukan dari kami juga," tuturnya. ● me



FOTO: ANT

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2021 MAHKAMAH AGUNG

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin (kiri) didampingi Wakil Ketua Sunarto (kanan) memberikan keterangan pers pada acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu (29/12). Mahkamah Agung menyampaikan, sepanjang 2021 telah berhasil memutus perkara sebanyak 19.087, dari jumlah beban perkara sebanyak 19.254 atau sebesar 99,13 persen.

TNI AU Dalam Dugaan Oknum Prajurit Terlibat Pengiriman PMI Ilegal Korban Kapal Tenggelam

JAKARTA (IM) - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan ada dugaan keterlibatan prajurit TNI AU dalam kasus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Di antara PMI yang dikirim ke Malaysia itu, ada yang tewas saat kapal yang membawa mereka tenggelam.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldanyah menuturkan, TNI AU serius mendalami kasus itu.

"Tentang adanya dugaan keterlibatan prajurit TNI AU dalam pengiriman Tenaga Migran Indonesia ilegal ke Malaysia, TNI AU tengah serius mendalami hal tersebut," ujar Indan melalui keterangannya, Rabu (29/12).

Dia menjelaskan, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan stakeholder untuk menggali lebih jauh informasi tersebut. Menurut dia, hal tersebut untuk memperjelas duduk perkara. "Seperti instruksi pimpinan TNI AU, kami masih melakukan pendalaman dengan berkoordinasi dengan semua stake holder, untuk menggali dan mengembangkan informasi lebih lanjut agar masalahnya lebih jelas," ucap Kadispenau.

Indan menuturkan, TNI AU tak segan-degan memberikan sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku jika terbukti ada prajurit yang terlibat dalam kasus ini.

"Bila dalam perkembangannya terbukti memang ada oknum prajurit TNI AU yang terlibat dalam proses pengiriman TNI ilegal, dipastikan TNI AU akan memberikan sanksi hukum tegas sesuai aturan yang berlaku," tuturnya.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani sebelumnya menynebut ada dugaan keterlibatan anggota TNI dalam pengiriman pekerja migran ilegal ke Malaysia. Institusi yang dimaksud yaitu TNI AL dan TNI AU. Dugaan itu berdasarkan hasil investigasi tim khusus BP2MI, terkait peristiwa kapal tenggelam yang mengangkut Pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di perairan Johor, Malaysia.

"Adanya dugaan keterlibatan oknum TNI AL dan oknum TNI AU adanya dugaan keterlibatan yang memiliki peran masing-masing dalam membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal," ujar Benny di Jakarta, dikutip Rabu (29/12).

Benny menjelaskan, dirinya akan melaporkan hasil temuan investigasi ini ke pimpinan masing-masing instansi. Tak hanya itu, Benny juga akan bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa guna membahas permasalahan tersebut.

"Kami tentu gunakan kata dugaan karena kami akan searahkan masalah ini kepada pimpinan dari instansi masing-masing. Saya akan coba nanti bertemu Panglima TNI," tuturnya. ● han

POWER AUCTION				TERBUKA UNTUK UMUM
OPEN HOUSE	WAKTU OPEN HOUSE	LELANG	WAKTU LELANG	Syarat & Ketentuan Lelang :
Selasa - Rabu, 04 - 05 Januari 2022	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 06 Januari 2022	11.00 WIB s/d Selesai	1. Peminat LELANG MOBIL & MOTOR diwajibkan menyertakan uang jaminan sebesar : - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 NPKR MOBIL - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 NPKR MOTOR
Selasa - Rabu, 11 - 12 Januari 2022	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 13 Januari 2022	11.00 WIB s/d Selesai	2. Kondisi kendaraan yang akan dilelang adalah sebagaimana adanya ('as is')
Selasa - Rabu, 18 - 19 Januari 2022	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 20 Januari 2022	11.00 WIB s/d Selesai	3. Uang Jaminan dan pelunasan disetorkan ke rekening a/n PT. Power Assetindo Selaras A/C no. 571099971 di BCA cab. Kijal Carrigin, Jakarta Pusat
Minggu - Senin, 23 - 24 Januari 2022	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Selasa, 25 Januari 2022	11.00 WIB s/d Selesai	4. Apabila Pelunasan tidak terpenuhi dalam jangka waktu 5 (LIMA) hari setelah lelang maka pemenang lelang dinyatakan menang dan uang jaminan akan hangus 5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Power Assetindo Selaras, Telp 0812 1217 1861 (Ivori) atau melalui email : yudi.darmawan@power-auction.id

LOKASI OPEN HOUSE & LELANG
Jl. Palembang No.39 RT. 07 RW.08, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan

Jakarta, 30 Desember 2021
PANITIA LELANG

PENGUMUMAN	
PT. ASSET PACIFIC, berkedudukan di Jakarta Pusat, ('Perseroan'), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan akta tertanggal 28 Desember 2021, Nomor 123, yang dibuat dihadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan Konversi atas hutang Perseroan kepada tuan SURYA DARMADI, sebesar Rp. 1.800.000.000.000,- menjadi setoran saham dalam Perseroan.	
Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 Tahun 1999	
Jakarta, 30 Desember 2021	
Direksi PT ASSET PACIFIC	

Hatfield	
PT Hatfield Indonesia Plaza Harmoni Unit B5 - B7, Jl. Silivangi No. 46 Bogor 16131, Jawa Barat, Indonesia Tel: +62 251 8324 487 Fax: +62 251 8340 414 www.hatfieldgroup.com	
PENGUMUMAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH	
Seuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan ini diumumkan bahwa PT. Hatfield Indonesia, pemegang NPWP 01.069.373.7-058.000, telah melakukan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk tahun buku 2021 sebesar Rp91.937.093,00 dan US\$54.937.20 dengan perincian sebagai berikut:	
1. PT. Ganessa Indojava senilai Rp91.937.093,00 2. PT. RungePincocMincaro senilai US\$53.885,20 3. Sabah Forest Industries Sdn. Bhd senilai US\$51.052,00	
Demikian pengumuman ini kami sampaikan sebagai ralat atas pengumuman tanggal 31 Desember 2020.	
Bogor, 30 Desember 2021 Bambang Tri Sasongko Adi Vice President PT. Hatfield Indonesia	